PENEGAKAN HUKUM MENGENAI HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

PENULIS : Muhammad Ilham Adinugroho

ANGGOTA PENULIS : Asep Suherman, S.H., M.H.

adinugrohomuhammadilham@gmail.com, asepsuherman@unib.ac.id

Abstrack

Human Rights (HAM) are the rights that each individual has as creature made by God. The battle for equity and the fulfillment of human rights has been going on for a long time all through the world, and no one knows for beyond any doubt when this battle started. Requirement of human rights emerges from infringement of the law. This can be the obligation of all levels of society, not fair state teach. Everybody is anticipated to work together to maintain human rights and realize the standards of fair humankind and a affluent society. The arrangement of law cannot be isolated from the judge's choice relating to law authorization. Law authorization is the method of accomplishing legitimate objectives so that legal ideas can gotten to be a reality. This article examines human rights within the setting of a run the show of law, between dynamic law and positive law. Dynamic law is law that sides with equity and the interface of the individuals. In surveying lawful performing artists, it is trusted that there will be genuineness, sympathy and concern for the individuals in law authorization. The creator chose this subject since law authorization related to human rights in Indonesia is still not ideal. The Indonesian state is still in a move stage that's shadowed by legal vulnerability. The most issues in this article are how the law applies to human rights infringement, which educate arraign human rights violators, the implies of determination utilized in cases of human rights infringement in Indonesia, and the standards of Islamic law

Keywords: Human Rights, Law Enforcement, Human Rights Violations, Progressive Law, Positive Law, Justice, Legal Institutions, Principles of Islamic Law.

Abstrak

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang dimiliki setiap individu sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Perjuangan untuk mencapai kesetaraan dan pemenuhan hak asasi manusia telah berlangsung lama di seluruh dunia, dan tidak ada yang tahu pasti kapan perjuangan ini dimulai. Persyaratan hak asasi manusia muncul dari pelanggaran hukum. Ini bisa menjadi kewajiban semua lapisan masyarakat, bukan ajaran negara yang adil. Semua orang diharapkan bekerja sama untuk menjaga hak asasi manusia dan mewujudkan standar kemanusiaan yang adil dan masyarakat yang sejahtera. Penataan hukum tidak bisa lepas dari pilihan hakim yang berkaitan dengan kewenangan hukum. Otorisasi hukum adalah cara untuk mencapai tujuan yang sah sehingga gagasan hukum dapat menjadi kenyataan. Artikel ini mengkaji hak asasi manusia dalam konteks *run the show of law*, antara hukum dinamis dan hukum positif. Hukum dinamis adalah hukum yang berpihak pada keadilan dan perhubungan antar individu. Dalam mensurvei artis-artis pertunjukan yang sah, diyakini akan ada ketulusan, simpati, dan kepedulian terhadap individu-individu yang berwenang. Pencipta memilih subjek ini karena kewenangan hukum terkait hak asasi manusia di Indonesia masih belum ideal. Negara Indonesia masih dalam tahap bergerak yang dibayangi oleh kerentanan hukum. Permasalahan utama dalam artikel ini adalah bagaimana hukum yang berlaku terhadap pelanggaran HAM, cara mendidik para pelanggar HAM, makna penetapan yang digunakan dalam kasus pelanggaran HAM di Indonesia, dan standar hukum Islam.

Kata kunci : Hak Asasi Manusia, Penegakan Hukum, Pelanggaran HAM, Hukum Progresif, Hukum Positif, Keadilan, Institusi Hukum, Prinsip Hukum Islam.

I. PENDAHULUAN

1). Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap manusia. Hak ini tidak bisa diabaikan karena setiap orang sebagai makhluk Tuhan memiliki martabat yang tinggi. HAM melekat pada setiap individu, sehingga bersifat universal, artinya berlaku di mana saja dan untuk siapa saja, serta tidak bisa dihilangkan oleh siapapun. Hak ini penting untuk menjaga martabat kemanusiaan dan menjadi dasar moral dalam berinteraksi dengan orang lain¹ (Faisal, 2019). Pentingnya pemahaman tentang hak asasi manusia harus ditanamkan di seluruh masyarakat Indonesia. Terkait perlindungan HAM, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 memutuskan untuk mengubah beberapa pasal dalam UUD 1945 yang berkaitan dengan HAM. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk memastikan hak asasi manusia dihormati dan ditegakkan di Indonesia.

Masalah penegakan HAM sering kali berkaitan erat dengan penegakan hukum, yang merupakan hal penting yang sering dikeluhkan oleh masyarakat saat ini. Salah satu keluhan utama adalah lemahnya penegakan hukum. Masyarakat merasa apatis melihat banyak kasus hukum besar, seperti tindak kriminal, kejahatan ekonomi, dan pelanggaran HAM, yang belum diselesaikan dengan baik. Mereka berharap hukum ditegakkan demi kebenaran² (Islamiyati dan Hendrawati, 2019). Di Indonesia dan di seluruh dunia, banyak terjadi pelanggaran HAM, di mana pelakunya sering kali bebas tanpa hukuman dari negara, yang dikenal sebagai impunitas. Impunitas berarti membiarkan pemimpin politik dan militer yang diduga terlibat dalam pelanggaran serius HAM, seperti genosida dan kejahatan perang, tidak diadili. Fenomena ini sudah berlangsung sejak lama hingga saat ini

¹ Faisal, F. (2019). Eksistensi Pengadilan HAM Terhadap Penegakan HAM Dalam Sistem Peradilan. *Golontalo Law Review*.

² Islamiyati dan Hendrawati. (2021).

Meskipun masih banyak pelanggaran HAM terjadi, di Indonesia terdapat lembaga seperti Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) dan pengadilan HAM

yang bertugas untuk menegakkan dan mengatur hukum HAM. Dengan adanya lembaga ini, diharapkan penegakan hukum HAM di Indonesia dapat meningkat³, Perlindungan HAM didasarkan pada dua pijakan utama: undang-undang dan konstitusi, serta peran Komnas HAM dan pengadilan HAM. Meskipun lembaga-lembaga ini ada, peran serta masyarakat dalam penegakan HAM sangat penting. Masyarakat berperan menentukan seberapa baik hukum HAM ditegakkan dan seberapa besar rasa hormat terhadap hak asasi manusia di lingkungan mereka.

2). Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Peran Masyarakat Sipil dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia?
- b. Mengapa Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia Masih Menjadi Tantangan dan apa solusinya?

II. METODE PENELITIAN

³ Islamiyati dan Hendrawati. (2021).

Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode. Pertama, penelitian perpustakaan (library research) dilakukan untuk mempelajari berbagai sumber pustaka dan karya ilmiah yang relevan dengan masalah yang diteliti. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memperoleh landasan teori serta pemahaman mengenai hukum yang berkaitan dengan topik yang dibahas⁴ Kedua, penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengumpulkan data dari studi pustaka, termasuk ketentuan atau peraturan hukum,, jurnal, buku, dan sumber lainnya yang relevan dengan permasalahan yang ingin diteliti.

III. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Hakikat hak asasi manusia dalam definisinya mencakup hak asasi manusia yang bersifat kodrati menurut Piagam PBB.

a.hak untuk memiliki sesuatu; b.Hak atas Pendidikan dan Pengajaran; c.Hak untuk Menganut Keyakinan atau Agama; d.Hak untuk hidup; e.Hak atas kebebasan hidup; f.Hak atas nama baik; g.Hak untuk Mendapatkan Pekerjaan; h.Hak atas perlindungan hukum.

Dalam konteks sistem hukum hak asasi manusia di Indonesia, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia pada masa pasca reformasi dapat merupakan suatu tahapan dalam penetapan dan penataan aturan yang secara konsisten mematuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia yang universal.⁵

Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 menetapkan peraturan hak asasi manusia berdasarkan Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB.

⁴ Hosna. (2021). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia. *PLEDOI (Jurnal Hukum dan Keadilan)*.

⁵ Sobarnapraja, A. (2022). Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Konvensi PBB tentang Hak Anak, dan berbagai instrumen internasional lainnya yang mengatur hak asasi manusia.

Isi undang-undang ini tentunya harus disesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan perkembangan hukum nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam UUD 1945 (sebagaimana telah diubah), persoalan hak asasi manusia secara khusus dibahas dalam Bab 39 tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 yang diundangkan pada tanggal 23 September 1999, dan terdapat beberapa bagian tentang hal-hal penting ditetapkan.

Pengadilan Hak..⁶

Selain penegak hukum, Peran masyarakat sipil dalam penegakan hukum mengenai hak asasi manusia di Indonesia sangat penting. Adapun beberapa peran masyarakat sipil untuk membantu penegakan hukum mengenai hak asasi manusia di Indonesia :

1. Advokasi dan Pemantauan

- a. Organisasi masyarakat sipil dapat melakukan advokasi kebijakan terkait perlindungan HAM kepada pemerintah.
- b. Melakukan pemantauan dan dokumentasi atas pelanggaran HAM yang terjadi di masyarakat.
- c. Menyuarakan perlindungan dan pemajuan HAM melalui kampanye publik.

2. Pendidikan dan Penyadaran

⁶ Supriyanto, B. H. (2019). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia.

- a. Melakukan edukasi dan pelatihan HAM bagi masyarakat, terutama kelompok rentan.
 - b. Mengedukasi masyarakat tentang hak-hak mereka dan cara-cara memperjuangkannya.
 - c. Meningkatkan kesadaran dan kepekaan masyarakat terhadap isu-isu HAM.
3. Partisipasi dan Kolaborasi
- a. Terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada HAM.
 - b. Menjalin kemitraan dengan pemerintah dan lembaga terkait dalam upaya penegakan HAM.
 - c. Membangun gerakan bersama dengan berbagai elemen masyarakat.
4. Pengawasan dan Pelaporan
- a. Mengawasi kinerja pemerintah dalam memenuhi kewajiban HAM.
 - b. Melaporkan pelanggaran HAM kepada otoritas yang berwenang.
 - c. Mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam penanganan kasus pelanggaran HAM⁷.

Walaupun Peran masyarakat sipil telah dijalankan untuk membantu penegakan hukum mengenai hak asasi manusia, masih ada tantangan dalam penegakan hukum mengenai hak asasi manusia. Tantangan tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor seperti :

1. Lemahnya Kerangka Hukum dan Kebijakan

⁷ Sobarnapraja, A. (2022). Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia.

- a. Undang-undang dan peraturan terkait HAM belum cukup komprehensif dan efektif.
 - b. Terdapat inkonsistensi antara kebijakan pemerintah dengan standar HAM internasional.
 - c. Proses pembuatan dan revisi peraturan sering tidak melibatkan partisipasi publik.
2. Terbatasnya Penegakan Hukum
- a. Penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM masih lemah dan tidak konsisten.
 - b. Aparat penegak hukum belum sepenuhnya memahami dan menjunjung tinggi HAM.
 - c. Proses peradilan acap kali dipengaruhi oleh kepentingan politik dan kekuasaan.
3. Budaya Impunitas
- a. Masih adanya budaya impunitas, di mana pelaku pelanggaran HAM tidak dihukum.
 - b. Kurangnya akuntabilitas dari aparat pemerintah dan penegak hukum.
 - c. Rendahnya kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum.
4. Diskriminasi dan Intoleransi
- a. Masih terjadi diskriminasi dan pelanggaran HAM terhadap kelompok rentan.⁸
 - b. Kasus intoleransi dan intoleransi di masyarakat belum tertangani dengan baik.

⁸ Marisa Nabila, O. S. (2023). STUDI LITERATUR: TANTANGAN DALAM MENEGAKKAN HUKUM KEADILAN DI INDONESIA. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(1).

- c. Kurangnya upaya pemerintah untuk menghapus praktik-praktik diskriminatif.⁹

Solusi untuk menegakkan hukum yang ada di Indonesia yang bisa dilakukan masyarakat sipil seperti :

1. Mendorong dialog dan keterlibatan semua pihak:
 - a. Masyarakat sipil dapat memfasilitasi forum-forum dialog terbuka yang melibatkan pemerintah, LSM, akademisi, tokoh masyarakat, dan korban pelanggaran HAM.
 - b. Dalam dialog ini, semua pihak dapat menyampaikan pandangan, pengalaman, dan usulan untuk mengatasi permasalahan penegakan HAM secara komprehensif.
 - c. Dialog yang konstruktif dan berkesinambungan dapat membangun pemahaman bersama dan komitmen kolektif untuk memperbaiki situasi HAM.
2. Memperkuat independensi dan kapasitas lembaga penegak hukum dan pemantau HAM:
 - a. Masyarakat sipil dapat melakukan advokasi untuk menjamin independensi lembaga-lembaga seperti Komnas HAM, Kompolnas, dan peradilan dari intervensi politik.
 - b. Mereka juga dapat mendorong peningkatan anggaran, sumber daya, dan keahlian teknis lembaga pemantau HAM agar dapat menjalankan fungsinya secara efektif.

⁹ Marisa Nabila, O. S. (2023). STUDI LITERATUR: TANTANGAN DALAM MENEGAKKAN HUKUM KEADILAN DI INDONESIA. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(1).

- c. Pengawasan publik dan partisipasi masyarakat sipil dalam proses pemilihan pimpinan lembaga pemantau HAM juga dapat meningkatkan akuntabilitas.
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum:
- a. Masyarakat sipil dapat memantau proses investigasi, penuntutan, dan peradilan atas kasus-kasus pelanggaran HAM.
 - b. Mereka dapat mengajukan tuntutan hukum dan laporan publik jika ditemukan indikasi penyalahgunaan kekuasaan atau upaya menghalangi proses hukum.
 - c. Keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat dalam proses penegakan hukum dapat meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik.
4. Mendorong reformasi hukum dan kebijakan sesuai standar HAM:
- a. Masyarakat sipil dapat mengajukan usulan-usulan revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM.
 - b. Mereka dapat melakukan advokasi untuk mendorong pemerintah mengharmonisasikan hukum nasional dengan standar HAM internasional yang telah diratifikasi Indonesia.
 - c. Partisipasi masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan terkait HAM juga penting untuk memastikan kebijakan tersebut responsif terhadap kebutuhan dan perlindungan hak-hak masyarakat.¹⁰

¹⁰ Lestari, S. A. (2021). Analisis Tantangan Negara Hukum Dalam Menegakkan Hukum Tatanegara Di Era Digital. *Jurnal Relasi Publik*.

5. Memfasilitasi partisipasi masyarakat sipil:

- a. Organisasi masyarakat sipil dapat meningkatkan kapasitas anggotanya dalam hal pemantauan, dokumentasi, dan advokasi kasus-kasus pelanggaran HAM.
- b. Mereka juga dapat membangun jejaring dan kolaborasi antar-organisasi untuk memperkuat gerakan penegakan HAM di tingkat lokal maupun nasional.
- c. Keterlibatan elemen masyarakat sipil yang beragam, seperti kelompok perempuan, anak-anak, minoritas, dan korban, dapat memperkaya perspektif dan strategi advokasi HAM.

Pada intinya, upaya penegakan hukum HAM yang efektif membutuhkan keterlibatan aktif dari masyarakat sipil dalam berbagai bentuk, mulai dari dialog, pemantauan, advokasi, hingga partisipasi dalam proses reformasi hukum dan kebijakan. Hanya dengan kolaborasi dan komitmen bersama dari semua pihak yang peduli, situasi HAM di Indonesia dapat diperbaiki secara bertahap dan berkelanjutan.¹¹

Agar hukum dan hak asasi manusia di tegakkan, bukan hanya masyarakat sipil saja yang berperan didalamnya tetapi seluruh masyarakat indonesia juga harus berperan, bisa berperan dalam hal :

¹¹ Lestari, S. A. (2021). Analisis Tantangan Negara Hukum Dalam Menegakkan Hukum Tatanegara Di Era Digital. *Jurnal Relasi Publik*.

1. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat

- a. Kampanye Kesadaran: Melaksanakan kampanye untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak asasi manusia dan pentingnya penegakannya.
- b. Pendidikan Formal: Mengintegrasikan pendidikan HAM dalam kurikulum sekolah untuk membangun kesadaran sejak dini.

2. Penguatan Lembaga Penegak Hukum

- a. Reformasi Lembaga: Meningkatkan independensi dan profesionalisme lembaga penegak hukum seperti polisi, kejaksaan, dan pengadilan.
- b. Pelatihan: Memberikan pelatihan tentang HAM kepada aparat penegak hukum untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip HAM.

3. Peningkatan Akuntabilitas

- a. Pengawasan Publik: Mendorong keterlibatan masyarakat sipil dalam memantau aktivitas lembaga penegak hukum dan memastikan akuntabilitas.
- b. Sistem Pelaporan: Membangun sistem yang memudahkan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran HAM dan memastikan bahwa laporan tersebut ditindak lanjuti.¹²

4. Advokasi dan Dukungan Hukum

- a. Layanan Hukum: Menyediakan akses bagi korban pelanggaran HAM untuk mendapatkan layanan hukum yang berkualitas.

¹² Sari, R. (2020). Peran Masyarakat Sipil dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia." *Jurnal Hak Asasi Manusia*.

- b. Jaringan Advokasi: Membangun jaringan antarorganisasi masyarakat sipil untuk saling mendukung dalam advokasi kasus-kasus pelanggaran HAM.

5. Dialog dan Keterlibatan Semua Pihak

- a. Forum Dialog: Mengadakan dialog antara pemerintah, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya untuk membahas isu-isu HAM secara terbuka.
- b. Keterlibatan Lokal: Mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan HAM.¹³

IV. PENUTUP

1). Kesimpulan :

Penegakan hukum HAM di Indonesia merupakan tantangan yang kompleks, dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kelemahan kerangka hukum, terbatasnya penegakan hukum, budaya impunitas, serta diskriminasi dan intoleransi. Meskipun terdapat upaya dari masyarakat sipil untuk mendukung penegakan HAM melalui advokasi, pendidikan, dan pemantauan, tantangan-tantangan tersebut masih memerlukan perhatian serius.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, meskipun mengandung prinsip-prinsip penting, belum sepenuhnya

¹³ Sari, R. (2020). Peran Masyarakat Sipil dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia." *Jurnal Hak Asasi Manusia*.

diimplementasikan secara efektif. Oleh karena itu, perlu kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan semua elemen masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi penegakan HAM.

2). Saran :

Dengan penelitian ini diharapkan jurnal ini dapat dibaca oleh semua orang untuk kita bersama – sama sebagai pemerintah, masyarakat sipil dan semua elemen masyarakat untuk dapat menegakkan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal :

Dewi, D. A. (2021). Hak Asasi Manusia: Pentingnya Pelaksanaan Dan Penegakan Hak Asasi . *Journal Civics & Social Studies*.

Fisal, F. (2019). Eksistensi Pengadilan HAM Terhadap Penegakan HAM Dalam Sistem Peradilan. *Golontalo Law Review*.

Hendrawati, I. d. (2019). Analisis Politik Hukum Dan Implementasinya.

Hosna. (2021). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia. *PLEDOI (Jurnal Hukum dan Keadilan)*.

Lestari, S. A. (2021). Analisis Tantangan Negara Hukum Dalam Menegakkan Hukum Tatanegara Di Era Digital. *Jurnal Relasi Publik*.

Marisa Nabila, O. S. (023). STUDI LITERATUR: TANTANGAN DALAM MENEGAKKAN HUKUM KEADILAN DI INDONESIA. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(1).

Maylani, U. G. (2022). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia Di Indonesia.

Peradilan, E. P. (2019). Fatma Fisal. *Gorontalo Law Review*, 2(1).

Reynaldi, W. (2023). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia.

RK. Sari, R. b. (2019). PERKEMBANGAN PENGATURAN HAK ASASI MANUSIA. 2(2).

Sari, R. (2020). Peran Masyarakat Sipil dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia." . *Jurnal Hak Asasi Manusia*.

Sobarnapraja, A. (2022). Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Suarlin, & F. (2022). *DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA*. Widina.

Sudrajat, S. A. (2022). Hak Asasi Manusia (HAM) Sebagai Bentuk Kebijakan Politik Dalam .

Supriyanto, B. H. (2019). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia.

Widyawati, W. (2022). Penegakan Hukum Dalam Negara Indonesia Yang Demokratis.

BUKU :

Marzuki, d. S. (2022). *Hukum dan Hak Asasi Manusia*.

Islamiyati dan Hendrawati. (2021).

INTERNET :

Artikel dari Amnesty International Indonesia:

"Tantangan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia"

Link: <https://www.amnesty.id/tantangan-penegakan-ham-di-indonesia/>

Jurnal "Jurnal HAM" dari Komnas HAM

Link: <https://www.komnasham.go.id/index.php/publikasi/jurnal-ham/>

Artikel dari UNDP Indonesia:

"Memperkuat Peran Masyarakat Sipil dalam Penegakan HAM di Indonesia"

Link:

<https://www.id.undp.org/content/indonesia/id/home/stories/memperkuat-peran-masyarakat-sipil-dalam-penegakan-ham-di-indon.html>